

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 dapat diselesaikan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan LKjIP juga merupakan tindak lanjut penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan berbagai peraturan pelaksanaannya, serta pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP merupakan salah satu upaya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel, yang didalamnya mencakup sebuah kinerja yang direncanakan dengan baik, dapat diukur dengan jelas, dan dipertanggungjawabkan secara baik.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat dalam rencana strategik organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan, dan kebijakan operasional dalam rangka pencapaian tujuan yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 – 2026.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggung jawaban atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

LKjIP ini merupakan capaian kinerja (performance result) sesuai dengan rencana kinerja (performance plan) yang merupakan penjabaran tahunan dari Renstra Bappeda Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 – 2026.

LKjIP ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauhmana sasaran pembangunan yang ditujukan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Bappeda Kabupaten Lampung Barat yang telah dicanangkan pada tahun 2023 telah berhasil dicapai.

Dari 2 (dua) IKU yang telah ditetapkan, seluruhnya dapat dicapai dengan hasil yang baik. Capaian kinerja Bappeda Tahun Anggaran 2023 sangat baik atau masuk dalam kategori sangat tinggi, dengan hasil rata-rata capaian indikator sasaran sebesar 99,51%. Sedangkan hasil Meningkatnya implementasi inovasi daerah sebesar 100%. Keberhasilan capaian IKU Bappeda Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil dari pengerahan sumber daya yang ada, dukungan, dan partisipasi seluruh komponen masyarakat baik swasta maupun masyarakat pada umumnya secara integral dan sinergi dalam memenuhi program-program Bappeda Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023.

Beberapa indikator sasaran yang belum dapat memenuhi target kinerja, karena ada beberapa hambatan kendala yang apabila tidak segera diantisipasi dapat berpengaruh pada capaian sasaran yang akan datang.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional untuk memantapkan kebijakan sebagai upaya mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja ini juga sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan, terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan



serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Laporan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi yang objektif atas penyelenggaraan pemerintahan oleh stake holders yang berhak dan berkepentingan dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat.



Liwa,
KEPALA BAPPEDA

AGUSTANTO BASMAR, S.P.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690302 199803 1 007



BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan tujuan daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dengan diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka sejalan dengan hal



tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian tujuan, kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2023 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan Fungsi Penunjang urusan pemerintah dibidang Perencanaan Pembangunan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

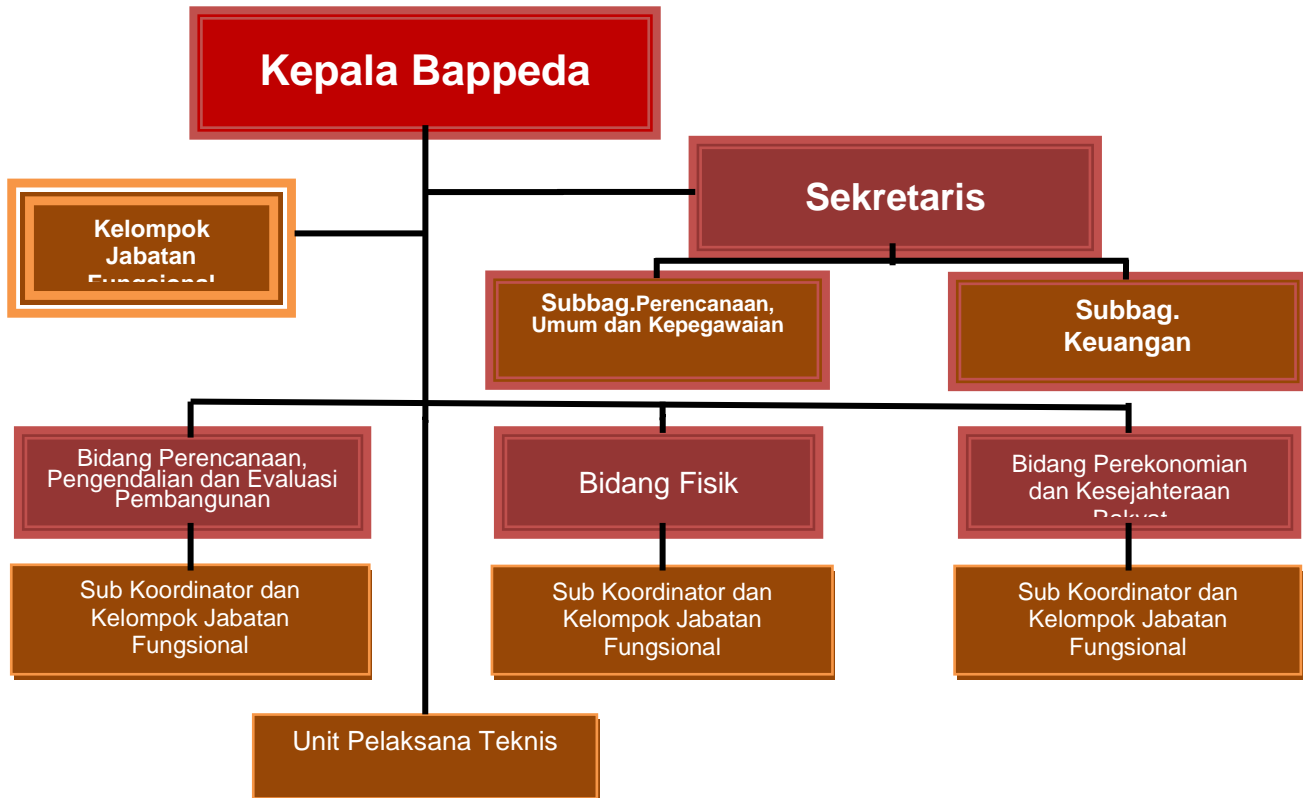
1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Bappeda
Kabupaten Lampung Barat



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2023 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat, Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Fisik, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi Kelompok



Jabatan Fungsional;

6. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

7. Unit Pelaksana Teknis Badan.

Peran Strategis

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Lampung Barat merupakan salah satu organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016, yang berperan sebagai unsur penunjang dari penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Fungsi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Lampung Barat adalah :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bappeda juga merupakan unsur Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kepala Daerah di bidang perencanaan daerah. Maka dapat dikatakan peran Bappeda sangat strategis dalam hal menentukan arah kebijakan pemerintah daerah dalam bidang perencanaan pembangunan sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Isu Strategis

1. Masih rendahnya kualitas, kapasitas dan komitmen SDM Perencana untuk mewujudkan kualitas para perencana teknokratik dan memantapkan kelembagaan Bappeda selaku institusi perencana.
2. Melaksanakan proses perencanaan pembangunan secara tepat waktu dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
3. Keinginan untuk mewujudkan tata kelola birokrasi dan pemerintahan yang baik dan bersih melalui penguatan koordinasi dan sinkronisasi antara institusi perencana dengan institusi penganggaran, untuk menjaga konsistensi sistem perencanaan pembangunan daerah.
4. Masih kurangnya koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan dalam penyusunan perencanaan pembangunan disemua sektor



(kewilayahan, ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan data dan informasi).

5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten terimplementasi sesuai dengan rencana peruntukannya.
6. Mendorong meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk mendukung aktivitas masyarakat dan kebutuhan akan ruang yang lebih manusiawi.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perencanaan Strategis

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada tujuan dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun yaitu dari tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023- 2026. Penetapan jangka waktu 4 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan tujuan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 dengan melibatkan para *stake holder* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD, Forum



SKPD, sehingga Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat dan *stake holder*.

Selanjutnya, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat yang merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi BAPPEDA Lampung Barat

Guna tercapainya tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam menunjang pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, diperlukan upaya-upaya atau langkah-langkah kerja yang bersifat strategis, dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal guna mengantisipasi resiko gagalnya fungsi dan kinerja Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan pemenuhan target sasaran dalam menunjang pencapaian tujuan Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah setiap tahunnya.

Strategi Bappeda Lampung Barat dalam mewujudkan tujuan dan sasarannya dirumuskan, sebagai berikut:

- a. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan , dilakukan melalui strategi :
 - 1) Meningkatnya Kualitas Dokumen perencanaan dan Evaluasi Pembangunan daerah.
 - 2) Meningkatkan Koordinasi Perencanaan antar Perangkat Daerah.

Arah Kebijakan BAPPEDA Lampung Barat

Arah kebijakan merupakan logical framework yang memberikan panduan dari langkah strategis yang telah dirumuskan agar target kinerja dari tiap sasaran yang menjadi indikator kinerja perangkat daerah dapat terpenuhi sesuai yang diharapkan. Rumusan Arah Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah Bappeda Lampung Barat 2023-2026, sebagai berikut:



Arah Kebijakan dari sasaran Strategi :

1. Meningkatnya Kualitas Dokumen perencanaan dan Evaluasi Pembangunan daerah arah kebijakan sebagai berikut:

a. Melaksanakan Penyusunan Dokumen perencanaan dan Evaluasi dokumen Sesuai aturan yang berlaku.

2. Arah Kebijakan dari sasaran Strategi :

Meningkatkan Koordinasi Perencanaan antar Perangkat Daerah sebagai berikut:

A. Menjalankan Koordinasi secara Berkala dan Periodik.

Guna mencapai target sasaran dari Rencana Strategisnya, Bappeda Lampung Barat merumuskan 2 (Dua) upaya strategi dengan 2 arah kebijakan, serta didukung kedalam 2 (Dua) Program Strategis.

2. Program dan Kegiatan Pembangunan
Table 2.1

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
				Tahun 2023	
				Target	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perencanaan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda	82,79	Persentase
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	28	dokumen
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dokumen



		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	4	dokumen
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	312	orang/ bulan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	dokumen
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	0	dokumen
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	dokumen



		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0	dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	laporan
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	dokumen
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	dokumen
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	dokumen
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	dokumen
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0	laporan
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0	laporan



		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	laporan
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	laporan
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0	dokumen
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	0	dokumen
		Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	0,00	dokumen
		Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	0,00	dokumen
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	0,00	laporan
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	0,00	dokumen
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	dokumen
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0,00	unit
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0,00	paket
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1,00	dokumen



		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0,00 dokumen
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0,00 dokumen
		Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	0,00 orang
		Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	0,00 laporan
		Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	0,00 orang
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4,00 orang
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00 orang
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00 orang
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket penyediaan administrasi umum	3 paket
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00 paket
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0,00 paket
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0,00 paket
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1,00 paket



	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1,00 paket
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1,00 dokumen
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0,00 paket
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1,00 Laporan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,00 Laporan
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0,00 dokumen
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0,00 dokumen
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerahat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	1 unit
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0,00 unit
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0,00 unit
	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0,00 Unit
	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	0,00 Unit
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0,00 Unit



		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1,00 Unit
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0,00 Unit
		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0,00 Unit
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0,00 Unit
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0,00 Unit
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0,00 Unit
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub organisasi yang disediakan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 sub organisasi
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,00 laporan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1,00 laporan
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0,00 laporan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1,00 laporan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	13 unit



		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0,00 unit
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11,00 unit
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	0,00 unit
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	0,00 unit
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0,00 unit
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1,00 unit
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0,00 unit
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0,00 unit
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0,00 unit
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1,00 unit
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0,00 unit
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan	0,00 Ha



			Pemeliharaan/Rehabilitasi		
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase OPD yang Mencapai Target Kinerja	1	Persentase
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pendanaan	5	dokumen
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	0,00	Dokumen
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	Dokumen
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	Berita acara
		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1,00	Berita acara
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1,00	Berita acara
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	0,00	Usulan
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	5	Dokumen



		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen analisis data ... yang disusun	0	0
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	0,00	Masukan
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	50,00	Orang
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	100,00	Buku
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	0
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3,00	Laporan
		Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	0,00	Kerjasama
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4,00	Laporan



		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	0	0	0
		Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	0,00	Dokumen
		Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	0,00	Dokumen
		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	Dokumen
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang Bidang Perencanaan Bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA	1	Persentase
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	0	0	0
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3,00	Dokumen



		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	10,00 perangkat Daerah
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	10,00 laporan
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2,00 laporan
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3,00 dokumen
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	5,00 Perangkat Daerah
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	5,00 Perangkat Daerah



		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3,00 laporan
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	0	0 0
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3,00 dokumen
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	6,00 perangkat daerah
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	6,00 perangkat daerah
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1,00 laporan



		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1,00 dokumen
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	3,00 perangkat daerah
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	3,00 perangkat daerah
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1,00 laporan
			0	0 0
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1,00 dokumen
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4,00 perangkat daerah



		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4,00 perangkat daerah
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1,00 laporan
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1,00 dokumen
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	3,00 perangkat daerah
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	3,00 perangkat daerah
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1,00 laporan



B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP	22,87
		Nilai komponen pengukuran kinerja pada SAKIP	17,63

Berdasarkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/259/AA.05/2023 Tanggal 27 November 2023 menjelaskan : Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menunjukkan bahwa memperoleh nilai sebesar 66,41 dengan predikat 'B' yaitu berkualitas penerapan manajemen kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil telah menunjukkan hasil yang baik pada sebagian unit kerja.

Rincian hasil evaluasi sebagai berikut :

Komponen yang dinilai		Bobot	Tahun	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30	22,50	21,34
2	Pengukuran Kinerja	30	19,50	19,70
3	Pelaporan Kinerja	15	10,91	10,58
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,74	14,79
Nilai Hasil Evaluasi		100	68,65	66,41
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B

Badan perencanaan pembangunan daerah mendukung sasaran pada komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja.

Komponen yang dinilai	Target Kinerja 2023	Nilai Hasil Evaluasi (2023)	Persentase	Ket	
1	Perencanaan Kinerja	22,87	21,34	(93,31 %)	Kurang dari target
2	Pengukuran Kinerja	17,63	19,70	111%	Melebihi dari target

Dapat dilihat target dan hasil dari komponen yang diungkit di komponen perencanaan kinerja tidak mencapai target hal ini dikarenakan ada beberapa catatan sebagai berikut :

- Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagai dokumen perencanaan kinerja transisi menuju tahun 2025.



Namun RPD tersebut belum digunakan dalam perencanaan jangka pendek tahun 2023 pada beberapa perangkat daerah. Hal ini mengakibatkan adanya ketidakselarasan pada perencanaan jangka menengah (lima tahunan) dengan perencanaan jangka pendek (tahunan).

- b. Sasaran strategis dan indikator kinerja pada sebagian perangkat daerah belum sepenuhnya berorientasi hasil (*outcome*) dan relevan untuk mengukur sasaran strategis.
- c. Penetapan target tahunan pada Perjanjian Kinerja telah sesuai dengan rencana strategis, namun masih ada target di beberapa perangkat daerah sampel yang belum disesuaikan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.
- d. Penjabaran kinerja yang disusun belum sepenuhnya memenuhi prinsip logis sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja instansi pemerintah yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta belum menggambarkan pemecahan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Selain itu, penjabaran kinerja masih berorientasi pada urusan sehingga tidak terlihat hubungan lintas fungsi antar perangkat daerah yang dibutuhkan untuk mendukung tercapainya kinerja.
- e. Kepatuhan penyampaian dokumen perencanaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat belum berjalan baik, hal ini terlihat dari sebagian perangkat daerah yang belum menyampaikan dokumen perencanaan kinerja yang terbaru yang telah di tandatangani (perjanjian kinerja).



BAB III KAPASITAS ORGANISASI

A. Analisis Sumber Daya Manusia

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lampung Barat tercatat sebanyak 28 orang Aparatur Sipil Negera, 15 orang Tenaga Harian Lepas Sukarela sehingga total sumber daya manusia dilingkungan Bappeda Kabupaten Lampung Barat berjumlah 43 orang. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Komposisi Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Status	Jumlah	Persentase (%)
PNS	28	70%
THLS	15	30%
Jumlah	43	100%

Sumber : Bappeda, 2024.

Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Pangkat golongan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.2

Keadaan ASN berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki-laki	19	75%
Perempuan	9	25%
Jumlah	28	100%

Sumber : Bappeda

Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.3

Keadaan ASN berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	S3	-	-
2.	S2	11	39,28%
3.	Sarjana (S1)	15	53,58%
4.	D3	1	3,57%
5.	SLTA	1	3,57%
6.	SMP	-	-
7.	SD	-	-
	Jumlah	28	100%

Sumber : Bappeda

Komposisi Pegawai berdasarkan Pangkat Golongan Ruang sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.4

Keadaan ASN Berdasarkan Pangkat Golongan Ruang

Pangkat, Golongan Ruang	Jumlah
Pembina Utama Muda, IV/c	1
Pembina Tingkat I, IV/b	1
Pembina , IV/a	5
Penata Tingkat I, III/d	5
Penata, III/c	8
Penata Muda Tk.I, III/b	1
Penata Muda, III/a	7
Jumlah	28
Pengatur Tingkat I, II/d	-
Pengatur, II/c	-
Pengatur Muda Tk.I, II/b	-
Pengatur Muda, II/a	-
Jumlah	-
Juru muda, I/a	-
Jumlah	-
JUMLAH (1+2+3+4)	28

Sumber : Bappeda

Dari data tabel sumber daya manusia diatas bila disandingkan dengan struktur organisasi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan maka, personil yang menduduki Jabatan struktural sebanyak 7 orang atau 25%, dibandingkan dengan kelompok jabatan fungsional dan pelaksana sebanyak 21 orang atau 75% hal ini didasari oleh Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 70 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Penyelenggaraan tugas kedinasan yang efisien dan efektif menuju kinerja yang optimal



memerlukan suatu pola penanganan yang meliputi penempatan karyawan dalam suatu jabatan didasarkan prinsip *The Right Man on The Right Place*. Disamping itu perlu adanya peningkatan kemampuan melalui pelatihan dan pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan tentunya tidak kalah pentingnya dalam proses pembinaan dan pengembangan karir pegawai menerapkan system *Reward and Punishment* yang tegas dan adil.

Mengacu pada *job description* dan *job analysis* bahwa tiap-tiap jabatan eselon IV setara dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Koordinator dibawah kesekretariatan dan Bidang untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya membawahi minimal 3 orang personil dengan tingkat kualifikasi pendidikan Sarjana atau Pasca Sarjana. Sesungguhnya komposisi ideal total personil Bappeda dengan Struktur Organisasi saat ini adalah 49 orang ditambah dengan kualifikasi tenaga fungsional perencana 10% dan UPT data.

Tuntutan pekerjaan mengharuskan pegawai senantiasa menguasai informasi dan regulasi terkini dalam merumuskan setiap kebijakan dan tugas kedinasan, tetapi tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada. Upaya untuk meningkatkan performa kinerja pegawai sebelum melakukan kerja, idealnya mengikuti diklat terlebih dahulu.

Berikut Diklat/kursus yang pernah diikuti personil Bappeda yaitu :

- ❖ Teknik Manajemen Perencanaan Pembangunan Dasar (TMP-PD)
- ❖ Manajemen Strategis Produk Unggulan Daerah
- ❖ Perencanaan Pembangunan Produk Domestik Regional Bruto
- ❖ Orientasi Peningkatan Kapasitas Manajemen Pusat Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
- ❖ Kursus Rencana Teknik Penghijauan
- ❖ Kursus Sistem Informasi Pesisir
- ❖ Kursus Sistem Informasi Geografis
- ❖ Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
- ❖ TOT Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002
- ❖ Sistem Tata Usaha Keuangan Daerah
- ❖ Diklat Laporan Pertanggungjawaban Bupati / Walikota se - Indonesia
- ❖ Penyusunan RASK/DASK dan RAPBD pola Kepmendagri Nomor : 29 Tahun 2002
- ❖ Diklat Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
- ❖ Teknik Manajemen Perencana Pembangunan Lanjutan (TMP-PL)
- ❖ Workshop Planning Financial Province and District
- ❖ Kursus Keuangan Daerah (KKD) 4 bulan



- ❖ Diklat Permendagri No. 13 Tahun 2006
- ❖ Diklat Permendagri No. 54 Tahun 2010
- ❖ Bimtek Penyusunan RPJMD
- ❖ Bimtek Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- ❖ Bimtek Penyusunan Laporan Kinerja Online
- ❖ Bimtek Penyusunan Evaluasi Renja SKPD
- ❖ Pelatihan Sistem Informasi Geografis (SIG)

B. Analisis Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas Program kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana yang ada di Bappeda

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Drone	1
2	Gorden	2
3	Kanopi Garasi	1
4	UPS Server	2
5	UPS	2
6	Stabilizer	2
7	Sound System (SP Alpha Sound WLS 15')	1
8	Sound System (SP Hard Guset 15')	2
9	Sound System (Tiang SPK 15')	3
10	Mobil Minibus	2
11	Mobil Pick Up	1
12	Motor Roda 2	6
13	Meja Biro	3
14	Meja ¹ / ₂ Biro	32
15	Kursi Lipat	140
16	Meja Komputer	7
17	Kursi Putar	17
18	Meja Rapat Besar	12
19	Meja Rapat Kecil	3
20	Kursi Tamu	2



21	Sice	1
22	Lemari Buku	5
23	Lemari Besi	2
24	Filling Kabinet	5
25	Laptop	8
26	Komputer	10
27	Server	1
28	GPS	2
29	Printer	7
30	Telpon	1
31	Mesin Fax	1
32	Kamera	2
33	Penghancur Kertas	2
34	Mesin Tik	3
35	Meja Rapat Bundar	1
36	Kursi Putar Rapat	4
37	Kursi ¹ / ₂ Biro	11
38	Podium	1
39	Genset	2
40	Wireles TOA	1
41	Sound Sistem	1

Sumber : Bappeda

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bappeda didukung Sarana operasional kendaraan roda empat sebanyak 4 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 7 unit. Kondisi ini sudah cukup baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Tabel 2.6
Data Kendaraan Dinas

NO	Uraian	Kendaraan Roda 4	Kendaraan Roda 2
1	Kepala	1	-
2	Sekretaris	1	3
3	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	-	2
4	Bidang Fisik	1	1
5	Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	1	1



Data Sarana dan Prasarana yang masih tidak terpakai (tidak dapat dipergunakan)

No.	Uraian	Tahun Perolehan	Jumlah
1.	Sepeda Motor Suzuki A.100	1992	1 Unit
2.	Sepeda Motor Honda GL	1994	1 Unit
3.	LCD Proyektor Panasonic LB.332	2016	1 Unit
4.	Handyam Panasonic	2004	1 Unit
5.	Digicam Olympus	2004	1 Unit
6.	Hard Disk Eksternal Toshiba	2016	1 Unit
7.	Genset Hetsudenki	2005	1 Unit
8.	Komputer Samsung	2004	1 Unit
9.	Laptop Toshiba	2005	1 Unit
10.	Komputer Logix P-III	2005	1 Unit
11.	Komputer	2002	1 Unit
12.	Printer Canon Pixma Mx.308	2002	1 Unit
13.	Mesin Tik Olimpia	2006	1 Unit
14.	Kursi Putar	2004	1 buah
15.	Lemari Kayu Olymppic	2001	1 Buah
16.	Meja Komputer	2002	1 buah
17.	Filling Cabinet	2002	1 buah
18.	Meja 1 Biro	2001	1 buah
19.	Meja ½ biro	2002	1 buah
20.	Meja 1 Biro olympic	2002	1 buah
21.	Filling Cabinet	2001	1 buah
22.	Tiang Triangle	2008	1 set
23.	Antena Seet	2008	1 set
24.	Antena Sectoral Microwave 5,4 GH	2008	1 Set
25.	Layar OHP	2006	1 Set



C. Analisis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023

Tabel 2.7
Program dan Kegiatan

5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
5.01	PERENCANAAN	5.987.944.724
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.248.214.024
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	53.203.000
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.631.726.100
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.279.000
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.544.000
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	340.403.624
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.732.500
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.325.800
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.296.721.700
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	833.272.700
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi PemerintahanT Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	79.800.000
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	383.649.000
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.443.009.000
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	621.533.000
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	406.550.000
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	414.926.000

DPA Murni Tahun 2023 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah sebesar Rp.5.564.788.624 setelah adanya perubahan DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp. 5.987.944.724 dengan penambahan sebesar Rp. 423.156.100,-

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan Tujuan organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan Daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah.

A. Capaian Kinerja

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi



pemerintah yang bersangkutan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor : 050/634/IV.02/KPTS/2022 tanggal 13 Maret 2022 dan melalui Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : 36 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Barat. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada SAKIP	poin	22,87	21,34	93,31
2	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada SAKIP	poin	17,63	19,70	111.11

Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa seluruh indikator-indikator yang telah ditetapkan, pada tahun 2023 target dari Komponen Perencanaan Kinerja tidak sesuai dengan target sedangkan untuk target dari Komponen Pengukuran Kinerja melebihi dari target yang direncanakan. Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan

a. Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada SAKIP

Secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2023-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 sebanyak 1



sasaran.

Tahun 2023 adalah tahun ke 1 pelaksanaan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dari sebanyak 1 sasaran strategis dengan sebanyak 2 indikator kinerja yang ditetapkan. Pencapaian indikator komponen perencanaan kinerja tidak mencapai target dikarenakan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/259/AA.05/2023 Tanggal 27 November 2023 menjelaskan :

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menunjukkan bahwa memperoleh nilai sebesar 66,41 dengan predikat 'B' yaitu berkualitas penerapan manajemen kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil telah menunjukkan hasil yang baik pada sebagian unit kerja.

Dapat dilihat target dan hasil dari komponen yang diungkit di komponen perencanaan kinerja tidak mencapai target hal ini dikarenakan ada beberapa catatan sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagai dokumen perencanaan kinerja transisi menuju tahun 2025. Namun RPD tersebut belum digunakan dalam perencanaan jangka pendek tahun 2023 pada beberapa perangkat daerah. Hal ini mengakibatkan adanya ketidakselarasan pada perencanaan jangka menengah (lima tahunan) dengan perencanaan jangka pendek (tahunan).
- b. Sasaran strategis dan indikator kinerja pada sebagian perangkat daerah belum sepenuhnya berorientasi hasil (outcome) dan relevan untuk mengukur sasaran strategis.
- c. Penetapan target tahunan pada Perjanjian Kinerja telah sesuai dengan rencana strategis, namun masih ada target di beberapa perangkat daerah sampel yang belum disesuaikan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.
- d. Penjabaran kinerja yang disusun belum sepenuhnya memenuhi prinsip logis sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja instansi pemerintah yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta belum menggambarkan pemecahan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Selain itu, penjabaran kinerja masih berorientasi pada urusan sehingga tidak terlihat hubungan lintas fungsi antar perangkat daerah yang dibutuhkan untuk mendukung tercapainya kinerja.

Kepatuhan penyampaian dokumen perencanaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat belum berjalan baik, hal ini terlihat dari sebagian perangkat daerah yang belum menyampaikan dokumen perencanaan kinerja yang terbaru yang telah di tandatangani (perjanjian kinerja).

Sedangkan untuk komponen pengukuran kinerja melebihi dari target kinerja hal ini dikarenakan hasil pengukuran kinerja sudah sesuai dengan yang ditargetkan.

B. Perbandingan Kinerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor : 050/634/IV.02/KPTS/2022 tanggal 13 Maret 2022 telah ditetapkan sebanyak 1 sasaran dan sebanyak 2 indikator kinerja (*outcomes*) dengan rincian sebagai berikut :

- **Sasaran : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan dengan indikator:**

1. Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada SAKIP
2. Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada SAKIP

Perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 4.2

Perbandingan Kinerja dengan tahun sebelumnya

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perencanaan					
Indikator Tujuan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Tahun		
			2021	2022	2023
Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP dari Kemenpan RB	Poin	22,11	22,49	21,34
Nilai komponen pengukuran kinerja pada SAKIP	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP dari Kemenpan RB	Poin	16,04	16,84	19,70

Sebagai perbandingan dengan capaian indikator sasaran Bappeda Kabupaten Lampung Barat maka perlu dibandingkan dengan capaian indikator sasaran Bappeda Provinsi Lampung , namun dengan adanya perbedaan nomenklatur indikator sasaran



maka dapat disajikan sasaran Bappeda Provinsi Lampung sesuai dengan tabel di bawah ini :

Tabel 4.3
Indikator Sasaran Provinsi

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I SASARAN UTAMA					
1.	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100
2.	Persentase Usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD;	%	30	42,77	100
3.	Persentase PD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD;	%	100	100	100
4.	Persentase PD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD;	%	100	100	100
5.	Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.	%	90	90	100
II SASARAN PENDUKUNG					
1	Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi BAPPEDA	Nilai SAKIP BAPPEDA	BB	A	100

C. Realisasi Anggaran

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan.

3.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 3.248.214.024	Rp 3.166.063.982	97,47%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 53.203.000	Rp 53.191.000	99,98%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 32.750.000	Rp 32.738.000	99,96%
BELANJA OPERASI	Rp 32.750.000	Rp 32.738.000	
Belanja Barang dan Jasa	Rp 32.750.000	Rp 32.738.000	
Belanja Barang	Rp 11.500.000	Rp 11.500.000	
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 11.500.000	Rp 11.500.000	



Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp	459.000	Rp	459.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp	370.000	Rp	370.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp	3.023.500	Rp	3.023.500	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp	1.625.000	Rp	1.625.000	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	6.022.500	Rp	6.022.500	
Belanja Perjalanan Dinas	Rp	21.250.000	Rp	21.238.000	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp	21.250.000	Rp	21.238.000	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp	21.250.000	Rp	21.238.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp	1.741.000	Rp	1.741.000	100%
BELANJA OPERASI	Rp	1.741.000	Rp	1.741.000	
Belanja Barang dan Jasa	Rp	1.741.000	Rp	1.741.000	
Belanja Barang	Rp	1.741.000	Rp	1.741.000	
Belanja Barang Pakai Habis	Rp	1.741.000	Rp	1.741.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp	139.000	Rp	139.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp	275.000	Rp	275.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp	827.000	Rp	827.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp	500.000	Rp	500.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp	1.835.000	Rp	1.835.000	100%
BELANJA OPERASI	Rp	1.835.000	Rp	1.835.000	
Belanja Barang dan Jasa	Rp	1.835.000	Rp	1.835.000	
Belanja Barang	Rp	1.835.000	Rp	1.835.000	
Belanja Barang Pakai Habis	Rp	1.835.000	Rp	1.835.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp	290.000	Rp	290.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp	370.000	Rp	370.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp	800.000	Rp	800.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp	375.000	Rp	375.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp	2.381.000	Rp	2.381.000	100%
BELANJA OPERASI	Rp	2.381.000	Rp	2.381.000	
Belanja Barang dan Jasa	Rp	2.381.000	Rp	2.381.000	
Belanja Barang	Rp	2.381.000	Rp	2.381.000	



Belanja Barang Pakai Habis	Rp 2.381.000	Rp 2.381.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 116.000	Rp 116.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp 265.000	Rp 265.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 1.750.000	Rp 1.750.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp 250.000	Rp 250.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp 2.436.000	Rp 2.436.000	100%
BELANJA OPERASI	Rp 2.436.000	Rp 2.436.000	
Belanja Barang dan Jasa	Rp 2.436.000	Rp 2.436.000	
Belanja Barang	Rp 2.436.000	Rp 2.436.000	
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 2.436.000	Rp 2.436.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 174.000	Rp 174.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp 265.000	Rp 265.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 1.747.000	Rp 1.747.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp 250.000	Rp 250.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 2.060.000	Rp 2.060.000	100%
BELANJA OPERASI	Rp 2.060.000	Rp 2.060.000	
Belanja Barang dan Jasa	Rp 2.060.000	Rp 2.060.000	
Belanja Barang	Rp 2.060.000	Rp 2.060.000	
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 2.060.000	Rp 2.060.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 160.000	Rp 160.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 1.650.000	Rp 1.650.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp 250.000	Rp 250.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	100%
BELANJA OPERASI	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	
Belanja Barang dan Jasa	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	
Belanja Barang	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 1.135.000	Rp 1.135.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp 690.000	Rp 690.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan	Rp 6.300.000	Rp 6.300.000	



Kantor- Bahan Cetak			
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp 1.875.000	Rp 1.875.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp2.631.726.100	Rp 2.564.050.060	97,43%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.626.226.100	Rp 2.558.560.060	97,42%
BELANJA OPERASI	Rp2.626.226.100	Rp 2.558.560.060	
Belanja Pegawai	Rp2.626.226.100	Rp 2.558.560.060	
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1.726.103.100	Rp 1.680.420.060	
Belanja Gaji Pokok ASN	Rp 1.309.603.000	Rp 1.274.997.200	
Belanja Gaji Pokok PNS	Rp 1.309.603.000	Rp 1.274.997.200	
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Rp 139.071.500	Rp 135.403.090	
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp 139.071.500	Rp 135.403.090	
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Rp 105.064.200	Rp 102.270.000	
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp 105.064.200	Rp 102.270.000	
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	Rp 62.132.400	Rp 60.480.000	
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp 62.132.400	Rp 60.480.000	
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp 26.279.600	Rp 25.570.000	
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp 26.279.600	Rp 25.570.000	
Belanja Tunjangan Beras ASN	Rp 81.633.100	Rp 79.444.740	
Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp 81.633.100	Rp 79.444.740	
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Rp 2.299.900	Rp 2.236.385	
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp 2.299.900	Rp 2.236.385	
Belanja Pembulatan Gaji ASN	Rp 19.400	Rp 18.645	
Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp 19.400	Rp 18.645	
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp 900.123.000	Rp 878.140.000	
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	Rp 900.123.000	Rp 878.140.000	
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp 900.123.000	Rp 878.140.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	100%
BELANJA OPERASI	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
Belanja Barang	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 170.000	Rp 170.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp 250.000	Rp 250.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 330.000	Rp 330.000	



Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp	250.000	Rp	250.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Rp	2.000.000	Rp	2.000.000	100%
BELANJA OPERASI	Rp	2.000.000	Rp	2.000.000	
Belanja Barang dan Jasa	Rp	2.000.000	Rp	2.000.000	
Belanja Barang	Rp	2.000.000	Rp	2.000.000	
Belanja Barang Pakai Habis	Rp	2.000.000	Rp	2.000.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp	570.000	Rp	570.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp	330.000	Rp	330.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp	600.000	Rp	600.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp	500.000	Rp	500.000	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp	2.500.000	Rp	2.490.000	99,60%
BELANJA OPERASI	Rp	2.500.000	Rp	2.490.000	
Belanja Barang dan Jasa	Rp	2.500.000	Rp	2.490.000	
Belanja Barang	Rp	2.500.000	Rp	2.490.000	
Belanja Barang Pakai Habis	Rp	2.500.000	Rp	2.490.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp	1.010.000	Rp	1.000.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp	400.000	Rp	400.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp	465.000	Rp	465.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp	625.000	Rp	625.000	
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp	6.279.000	Rp	6.279.000	100%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp	4.279.000	Rp	4.279.000	100%
BELANJA OPERASI	Rp	4.279.000	Rp	4.279.000	
Belanja Barang dan Jasa	Rp	4.279.000	Rp	4.279.000	
Belanja Barang	Rp	4.279.000	Rp	4.279.000	
Belanja Barang Pakai Habis	Rp	4.279.000	Rp	4.279.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp	472.000	Rp	472.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp	630.000	Rp	630.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp	2.177.000	Rp	2.177.000	



Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp	1.000.000	Rp	1.000.000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	2.000.000	Rp	2.000.000	100%
BELANJA OPERASI	Rp	2.000.000	Rp	2.000.000	
Belanja Barang dan Jasa	Rp	2.000.000	Rp	2.000.000	
Belanja Barang	Rp	2.000.000	Rp	2.000.000	
Belanja Barang Pakai Habis	Rp	2.000.000	Rp	2.000.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp	225.000	Rp	225.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp	265.000	Rp	265.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp	1.010.000	Rp	1.010.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp	500.000	Rp	500.000	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	6.544.000	Rp	6.544.000	100%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp	3.234.000	Rp	3.234.000	100%
BELANJA OPERASI	Rp	3.234.000	Rp	3.234.000	
Belanja Barang dan Jasa	Rp	3.234.000	Rp	3.234.000	
Belanja Barang	Rp	3.234.000	Rp	3.234.000	
Belanja Barang Pakai Habis	Rp	3.234.000	Rp	3.234.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp	404.000	Rp	404.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp	480.000	Rp	480.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp	1.350.000	Rp	1.350.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp	1.000.000	Rp	1.000.000	
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp	3.310.000	Rp	3.310.000	100%
BELANJA OPERASI	Rp	3.310.000	Rp	3.310.000	
Belanja Barang dan Jasa	Rp	3.310.000	Rp	3.310.000	
Belanja Barang	Rp	3.310.000	Rp	3.310.000	
Belanja Barang Pakai Habis	Rp	3.310.000	Rp	3.310.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp	211.000	Rp	211.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp	220.000	Rp	220.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp	585.000	Rp	585.000	



Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp	250.000	Rp	250.000	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	2.044.000	Rp	2.044.000	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	340.403.624	Rp	339.838.624	99,83%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp	3.751.000	Rp	3.751.000	100%
BELANJA OPERASI	Rp	3.751.000	Rp	3.751.000	
Belanja Barang dan Jasa	Rp	3.751.000	Rp	3.751.000	
Belanja Barang	Rp	3.751.000	Rp	3.751.000	
Belanja Barang Pakai Habis	Rp	3.751.000	Rp	3.751.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp	3.751.000	Rp	3.751.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	13.978.000	Rp	13.978.000	100%
BELANJA OPERASI	Rp	13.978.000	Rp	13.978.000	
Belanja Barang dan Jasa	Rp	13.978.000	Rp	13.978.000	
Belanja Barang	Rp	13.978.000	Rp	13.978.000	
Belanja Barang Pakai Habis	Rp	13.978.000	Rp	13.978.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-suvenir/cendera mata	Rp	6.250.000	Rp	6.250.000	
Belanja Natura dan Pakan Natura	Rp	7.728.000	Rp	7.728.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp	48.172.600	Rp	48.171.600	100%
BELANJA OPERASI	Rp	48.172.600	Rp	48.171.600	
Belanja Barang dan Jasa	Rp	48.172.600	Rp	48.171.600	
Belanja Barang	Rp	48.172.600	Rp	48.171.600	
Belanja Barang Pakai Habis	Rp	48.172.600	Rp	48.171.600	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp	2.600.000	Rp	2.600.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp	45.572.600	Rp	45.571.600	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp	11.160.000	Rp	11.160.000	100%
BELANJA OPERASI	Rp	11.160.000	Rp	11.160.000	
Belanja Barang dan Jasa	Rp	11.160.000	Rp	11.160.000	
Belanja Jasa	Rp	11.160.000	Rp	11.160.000	
Belanja Jasa Kantor	Rp	11.160.000	Rp	11.160.000	
Belanja Langganan jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp	11.160.000	Rp	11.160.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp	14.709.024	Rp	14.709.024	100%
BELANJA OPERASI	Rp	14.709.024	Rp	14.709.024	
Belanja Barang dan Jasa	Rp	14.709.024	Rp	14.709.024	



Belanja Barang	Rp 14.709.024	Rp 14.709.024	
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 14.709.024	Rp 14.709.024	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabotan Kantor Lainnya	Rp 4.204.224	Rp 4.204.224	
Belanja Natura dan Pakan-Natura	Rp 9.112.800	Rp 9.112.800	
Belanja Natura dan Pakan-pakan	Rp 1.392.000	Rp 1.392.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 248.633.000	Rp 248.069.000	99,77%
BELANJA OPERASI	Rp 248.633.000	Rp 248.069.000	
Belanja Barang dan Jasa	Rp 248.633.000	Rp 248.069.000	
Belanja Barang	Rp 5.110.000	Rp 5.110.000	
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 5.110.000	Rp 5.110.000	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 5.110.000	Rp 5.110.000	
Belanja Perjalanan Dinas	Rp 243.523.000	Rp 242.959.000	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp 243.523.000	Rp 242.959.000	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 221.898.000	Rp 221.334.000	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 21.625.000	Rp 21.625.000	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 73.732.500	Rp 72.540.988	98,38%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 3.930.000	Rp 3.930.000	100%
BELANJA OPERASI	Rp 3.930.000	Rp 3.930.000	
Belanja Barang dan Jasa	Rp 3.930.000	Rp 3.930.000	
Belanja Barang	Rp 3.930.000	Rp 3.930.000	
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 3.930.000	Rp 3.930.000	
Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-benda pos	Rp 3.930.000	Rp 3.930.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 14.600.000	Rp 13.433.488	92,01%
BELANJA OPERASI	Rp 14.600.000	Rp 13.433.488	
Belanja Barang dan Jasa	Rp 14.600.000	Rp 13.433.488	
Belanja Jasa	Rp 14.600.000	Rp 13.433.488	
Belanja Jasa Kantor	Rp 14.600.000	Rp 13.433.488	
Belanja tagihan telepon	Rp 600.000	Rp 478.884	
Belanja Tagihan Air	Rp 1.000.000	Rp 693.270	
Belanja Tagihan Listrik	Rp 4.000.000	Rp 3.626.614	
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp 9.000.000	Rp 8.634.720	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 55.202.500	Rp 55.177.500	99,95%
BELANJA OPERASI	Rp 55.202.500	Rp 55.177.500	



Belanja Pegawai	Rp 14.520.000	Rp 14.520.000	
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp 14.520.000	Rp 14.520.000	
Belanja Honorarium	Rp 14.520.000	Rp 14.520.000	
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp 14.520.000	Rp 14.520.000	
Belanja Barang dan Jasa	Rp 40.682.500	Rp 40.657.500	
Belanja Barang	Rp 15.532.500	Rp 15.507.500	
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 15.532.500	Rp 15.507.500	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 8.044.000	Rp 8.044.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor kertas dan cover Lainnya	Rp 2.950.000	Rp 2.950.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-persediaan dokumen/administrasi tender Lainnya	Rp 275.000	Rp 250.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya Lainnya	Rp 2.763.500	Rp 2.763.500	
Belanja Jasa	Rp 25.150.000	Rp 25.150.000	
Belanja Jasa Kantor	Rp 25.150.000	Rp 25.150.000	
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	Rp 20.950.000	Rp 20.950.000	
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp 4.200.000	Rp 4.200.000	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 136.325.800	Rp 126.930.310	93,11%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 98.100.000	Rp 88.704.510	90,42%
BELANJA OPERASI	Rp 98.100.000	Rp 88.704.510	
Belanja Barang dan Jasa	Rp 98.100.000	Rp 88.704.510	
Belanja Barang	Rp 15.875.000	Rp 15.875.000	
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 15.875.000	Rp 15.875.000	
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp 15.875.000	Rp 15.875.000	
Belanja Jasa	Rp 14.600.000	Rp 5.204.510	
Belanja Jasa Kantor	Rp 14.600.000	Rp 5.204.510	
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp 14.600.000	Rp 5.204.510	
Belanja Pemeliharaan	Rp 67.625.000	Rp 67.625.000	



Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp	67.625.000	Rp	67.625.000	
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	Rp	56.250.000	Rp	56.250.000	
Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Roda Dua Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp	11.375.000	Rp	11.375.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	29.630.000	Rp	29.630.000	100%
BELANJA OPERASI	Rp	29.630.000	Rp	29.630.000	
Belanja Barang dan Jasa	Rp	29.630.000	Rp	29.630.000	
Belanja Barang	Rp	3.390.000	Rp	3.390.000	
Belanja Barang Pakai Habis	Rp	3.390.000	Rp	3.390.000	
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp	3.390.000	Rp	3.390.000	
Belanja Pemeliharaan	Rp	26.240.000	Rp	26.240.000	
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp	26.240.000	Rp	26.240.000	
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Bantu-Electric Generating Set	Rp	1.850.000	Rp	1.850.000	
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp	20.250.000	Rp	20.250.000	
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	Rp	4.140.000	Rp	4.140.000	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	8.595.800	Rp	8.595.800	100%
BELANJA OPERASI	Rp	8.595.800	Rp	8.595.800	
Belanja Barang dan Jasa	Rp	8.595.800	Rp	8.595.800	
Belanja Barang	Rp	6.795.800	Rp	6.795.800	
Belanja Barang Pakai Habis	Rp	6.795.800	Rp	6.795.800	
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp	6.795.800	Rp	6.795.800	
Belanja Jasa	Rp	1.800.000	Rp	1.800.000	
Belanja Jasa Kantor	Rp	1.800.000	Rp	1.800.000	
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	Rp	1.800.000	Rp	1.800.000	
PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp	1.296.721.700	Rp	1.293.110.600	99,72%
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp	833.272.700	Rp	831.142.300	99,74%
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Rp	35.579.000	Rp	35.461.000	99,67%



BELANJA OPERASI	Rp 35.579.000	Rp 35.461.000	
Belanja Barang dan Jasa	Rp 35.579.000	Rp 35.461.000	
Belanja Barang	Rp 16.579.000	Rp 16.579.000	
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 16.579.000	Rp 16.579.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 395.000	Rp 395.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 6.751.500	Rp 6.751.500	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp 2.625.000	Rp 2.625.000	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 5.607.500	Rp 5.607.500	
Belanja Jasa	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	
Belanja Jasa Kantor	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	
Honorarium narasumber atau pembahasan, moderator, pembawa acara, dan panitia	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp -	
Belanja Sewa Hotel	Rp -	Rp -	
Belanja Perjalanan Dinas	Rp 17.000.000	Rp 16.882.000	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp 17.000.000	Rp 16.882.000	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 17.000.000	Rp 16.882.000	
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Rp 115.285.400	Rp 114.785.400	99,57%
BELANJA OPERASI	Rp 115.285.400	Rp 114.785.400	
Belanja Barang dan Jasa	Rp 115.285.400	Rp 114.785.400	
Belanja Barang	Rp 35.785.400	Rp 35.785.400	
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 35.785.400	Rp 35.785.400	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 2.209.000	Rp 2.209.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp 550.000	Rp 550.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- bahan cetak	Rp 16.608.900	Rp 16.608.900	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 14.417.500	Rp 14.417.500	
Belanja Jasa	Rp 500.000	Rp 500.000	
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Rp 500.000	Rp 500.000	
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp 500.000	Rp 500.000	
Belana Perjalanan Dinas	Rp 79.000.000	Rp 78.500.000	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam	Rp 79.000.000	Rp 78.500.000	



Negeri					
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp	68.000.000	Rp	67.500.000	
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp	11.000.000	Rp	11.000.000	
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Rp	290.524.600	Rp	289.048.200	99,49%
BELANJA OPERASI	Rp	290.524.600	Rp	289.048.200	
Belanja Barang dan Jasa	Rp	290.524.600	Rp	289.048.200	
Belanja Barang	Rp	95.709.600	Rp	95.709.600	
Belanja Barang Pakai Habis	Rp	95.709.600	Rp	95.709.600	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp	6.240.000	Rp	6.240.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp	660.000	Rp	660.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp	41.184.600	Rp	41.184.600	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp	1.625.000	Rp	1.625.000	
Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cendera mata	Rp	5.250.000	Rp	5.250.000	
Belanja Natura dan Pakan-Natura	Rp	21.650.000	Rp	21.650.000	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	19.100.000	Rp	19.100.000	
Belanja Jasa	Rp	78.710.000	Rp	78.210.000	
Belanja Jasa Kantor	Rp	60.700.000	Rp	60.700.000	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp	4.700.000	Rp	4.700.000	
Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film dan Pemotretan	Rp	56.000.000	Rp	56.000.000	
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp	9.950.000	Rp	9.950.000	
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp	9.950.000	Rp	9.950.000	
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Rp	8.060.000	Rp	7.560.000	
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp	500.000	Rp	-	
Belanja Sewa Taman	Rp	1.000.000	Rp	1.000.000	
Belanja Sewa Hotel	Rp	6.560.000	Rp	6.560.000	
Belanja Perjalanan Dinas	Rp	116.105.000	Rp	115.128.600	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp	116.105.000	Rp	115.128.600	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp	97.880.000	Rp	97.658.600	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp	18.225.000	Rp	17.470.000	
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/	Rp	391.883.700	Rp	391.847.700	99,99%



Kota			
BELANJA OPERASI	Rp 391.883.700	Rp 391.847.700	
Belanja Barang dan Jasa	Rp 391.883.700	Rp 391.847.700	
Belanja Barang	Rp 113.855.500	Rp 113.855.500	
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 113.855.500	Rp 113.855.500	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 2.750.000	Rp 2.750.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 39.108.000	Rp 39.108.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp 26.250.000	Rp 26.250.000	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 39.747.500	Rp 39.747.500	
Belanja Perjalanan Dinas	Rp 278.028.200	Rp 277.992.200	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp 278.028.200	Rp 277.992.200	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 259.250.000	Rp 259.214.000	
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp 18.778.200	Rp 18.778.200	
Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 79.800.000	Rp 79.336.000	99,42%
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Rp 37.880.000	Rp 37.536.000	99,09%
BELANJA OPERASI	Rp 37.880.000	Rp 37.536.000	
Belanja Barang dan Jasa	Rp 37.880.000	Rp 37.536.000	
Belanja Barang	Rp 15.480.000	Rp 15.480.000	
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 15.480.000	Rp 15.480.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 705.000	Rp 705.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp 1.875.000	Rp 1.875.000	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 9.600.000	Rp 9.600.000	
Belanja Jasa	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	
Belanja Jasa Kantor	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Panitia	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	
Belanja Perjalanan Dinas	Rp 17.000.000	Rp 16.656.000	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam	Rp 17.000.000	Rp 16.656.000	



Negeri					
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp	17.000.000	Rp	16.656.000	
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp	41.920.000	Rp	41.800.000	99,71%
BELANJA OPERASI	Rp	41.920.000	Rp	41.800.000	
Belanja Barang dan Jasa	Rp	41.920.000	Rp	41.800.000	
Belanja Barang	Rp	20.670.000	Rp	20.670.000	
Belanja Barang Pakai Habis	Rp	20.670.000	Rp	20.670.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp	730.000	Rp	730.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp	1.200.000	Rp	1.200.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp	12.360.000	Rp	12.360.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp	2.000.000	Rp	2.000.000	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	4.380.000	Rp	4.380.000	
Belanja Perjalanan Dinas	Rp	21.250.000	Rp	21.130.000	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp	21.250.000	Rp	21.130.000	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp	21.250.000	Rp	21.130.000	
Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	383.649.000	Rp	382.632.300	99,73%
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Rp	176.635.000	Rp	176.019.000	99,65%
BELANJA OPERASI	Rp	176.635.000	Rp	176.019.000	
Belanja Barang dan Jasa	Rp	176.635.000	Rp	176.019.000	
Belanja Barang	Rp	36.098.500	Rp	36.098.500	
Belanja Barang Pakai Habis	Rp	36.098.500	Rp	36.098.500	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp	1.280.000	Rp	1.280.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp	770.000	Rp	770.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp	21.348.500	Rp	21.348.500	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp	1.750.000	Rp	1.750.000	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	10.950.000	Rp	10.950.000	
Belanja Jasa	Rp	18.820.000	Rp	18.820.000	
Belanja Jasa Kantor	Rp	16.000.000	Rp	16.000.000	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Panitia	Rp	16.000.000	Rp	16.000.000	
Belanja Sewa Gedung dan	Rp	2.820.000	Rp	2.820.000	



Bangunan			
Belanja Sewa Hotel	Rp 2.820.000	Rp 2.820.000	
Belanja Perjalanan Dinas	Rp 121.716.500	Rp 121.100.500	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp 121.716.500	Rp 121.100.500	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 118.256.500	Rp 117.640.500	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 3.460.000	Rp 3.460.000	
Monitoring. Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp 207.014.000	Rp 206.613.300	99,81%
BELANJA OPERASI	Rp 207.014.000	Rp 206.613.300	
Belanja Barang dan Jasa	Rp 207.014.000	Rp 206.613.300	
Belanja Barang	Rp 85.440.000	Rp 85.440.000	
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 85.440.000	Rp 85.440.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 1.700.000	Rp 1.700.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 53.300.000	Rp 53.300.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp 6.500.000	Rp 6.500.000	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 20.340.000	Rp 20.340.000	
Belanja Perjalanan Dinas	Rp 121.574.000	Rp 121.173.300	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp 121.574.000	Rp 121.173.300	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 121.574.000	Rp 121.173.300	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 1.443.009.000	Rp 1.426.625.750	98,86%
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp 621.533.000	Rp 612.957.000	98,62%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Rp 33.433.000	Rp 33.398.000	99,90%
BELANJA OPERASI	Rp 33.433.000	Rp 33.398.000	
Belanja Barang dan Jasa	Rp 33.433.000	Rp 33.398.000	
Belanja Barang	Rp 10.378.000	Rp 10.378.000	
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 10.378.000	Rp 10.378.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 494.000	Rp 494.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp 540.000	Rp 540.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 3.150.000	Rp 3.150.000	



Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp	500.000	Rp	500.000	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	5.694.000	Rp	5.694.000	
Belanja Perjalanan Dinas	Rp	23.055.000	Rp	23.020.000	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp	23.055.000	Rp	23.020.000	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp	17.000.000	Rp	16.965.000	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp	6.055.000	Rp	6.055.000	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp	34.323.000	Rp	34.323.000	100%
BELANJA OPERASI	Rp	34.323.000	Rp	34.323.000	
Belanja Barang dan Jasa	Rp	34.323.000	Rp	34.323.000	
Belanja Barang	Rp	10.103.000	Rp	10.103.000	
Belanja Barang Pakai Habis	Rp	10.103.000	Rp	10.103.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp	823.000	Rp	823.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp	860.000	Rp	860.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp	2.800.000	Rp	2.800.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp	1.240.000	Rp	1.240.000	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	4.380.000	Rp	4.380.000	
Belanja Perjalanan Dinas	Rp	24.220.000	Rp	24.220.000	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp	24.220.000	Rp	24.220.000	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp	24.220.000	Rp	24.220.000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Rp	142.870.000	Rp	141.450.000	99,01%
BELANJA OPERASI	Rp	142.870.000	Rp	141.450.000	
Belanja Barang dan Jasa	Rp	142.870.000	Rp	141.450.000	
Belanja Barang	Rp	14.732.000	Rp	14.732.000	
Belanja Barang Pakai Habis	Rp	14.732.000	Rp	14.732.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp	786.000	Rp	786.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp	960.000	Rp	960.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp	6.300.000	Rp	6.300.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp	625.000	Rp	625.000	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	6.061.000	Rp	6.061.000	



Belanja Perjalanan Dinas	Rp 128.138.000	Rp 126.718.000	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp 128.138.000	Rp 126.718.000	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 128.138.000	Rp 126.718.000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 42.811.000	Rp 42.505.000	99,29%
BELANJA OPERASI	Rp 42.811.000	Rp 42.505.000	
Belanja Barang dan Jasa	Rp 42.811.000	Rp 42.505.000	
Belanja Barang	Rp 17.086.000	Rp 17.086.000	
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 17.086.000	Rp 17.086.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 490.000	Rp 490.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp 735.000	Rp 735.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 9.396.000	Rp 9.396.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp 625.000	Rp 625.000	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 5.840.000	Rp 5.840.000	
Belanja Perjalanan Dinas	Rp 25.725.000	Rp 25.419.000	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp 25.725.000	Rp 25.419.000	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 12.750.000	Rp 12.444.000	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 12.975.000	Rp 12.975.000	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp 22.278.000	Rp 22.278.000	100%
BELANJA OPERASI	Rp 22.278.000	Rp 22.278.000	
Belanja Barang dan Jasa	Rp 22.278.000	Rp 22.278.000	
Belanja Barang	Rp 6.708.000	Rp 6.708.000	
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 6.708.000	Rp 6.708.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 236.000	Rp 236.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp 210.000	Rp 210.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 2.508.000	Rp 2.508.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp 250.000	Rp 250.000	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 3.504.000	Rp 3.504.000	
Belanja Perjalanan Dinas	Rp 15.570.000	Rp 15.570.000	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp 15.570.000	Rp 15.570.000	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 15.570.000	Rp 15.570.000	



Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp 345.818.000	Rp 339.003.000	98,03%
BELANJA OPERASI	Rp 345.818.000	Rp 339.003.000	
Belanja Barang dan Jasa	Rp 345.818.000	Rp 339.003.000	
Belanja Barang	Rp 78.954.000	Rp 78.954.000	
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 78.954.000	Rp 78.954.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 4.260.000	Rp 4.260.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp 2.735.000	Rp 2.735.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 15.925.000	Rp 15.925.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp 500.000	Rp 500.000	
Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/ Cindra Mata	Rp 9.656.000	Rp 9.656.000	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 45.878.000	Rp 45.878.000	
Belanja Jasa	Rp 42.700.000	Rp 42.400.000	
Belanja Jasa Kantor	Rp 40.800.000	Rp 40.800.000	
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp 40.800.000	Rp 40.800.000	
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Rp 1.900.000	Rp 1.600.000	
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp 1.900.000	Rp 1.600.000	
Belanja Sewa Hotel	Rp -	Rp -	
Belanja Perjalanan Dinas	Rp 224.164.000	Rp 217.649.000	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp 224.164.000	Rp 217.649.000	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 183.264.000	Rp 176.749.000	
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp 40.900.000	Rp 40.900.000	
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp 406.550.000	Rp 400.567.000	98,53%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 32.783.500	Rp 32.748.500	99,89%
BELANJA OPERASI	Rp 32.783.500	Rp 32.748.500	
Belanja Barang dan Jasa	Rp 32.783.500	Rp 32.748.500	
Belanja Barang	Rp 11.458.500	Rp 11.458.500	
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 11.458.500	Rp 11.458.500	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 684.000	Rp 684.000	



Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp	860.000	Rp	860.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp	4.518.000	Rp	4.518.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp	250.000	Rp	250.000	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	5.146.500	Rp	5.146.500	
Belanja Perjalanan Dinas	Rp	21.325.000	Rp	21.290.000	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp	21.325.000	Rp	21.290.000	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp	17.000.000	Rp	16.965.000	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp	4.325.000	Rp	4.325.000	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp	34.047.000	Rp	33.791.500	99,25%
BELANJA OPERASI	Rp	34.047.000	Rp	33.791.500	
Belanja Barang dan Jasa	Rp	34.047.000	Rp	33.791.500	
Belanja Barang	Rp	10.692.000	Rp	10.436.500	
Belanja Barang Pakai Habis	Rp	10.692.000	Rp	10.436.500	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp	502.000	Rp	502.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp	1.405.000	Rp	1.405.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp	3.540.000	Rp	3.540.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp	500.000	Rp	500.000	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	4.745.000	Rp	4.489.500	
Belanja Perjalanan Dinas	Rp	23.355.000	Rp	23.355.000	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp	23.355.000	Rp	23.355.000	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp	23.355.000	Rp	23.355.000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Rp	190.293.500	Rp	188.386.300	99,00%
BELANJA OPERASI	Rp	190.293.500	Rp	188.386.300	
Belanja Barang dan Jasa	Rp	190.293.500	Rp	188.386.300	
Belanja Barang	Rp	32.535.500	Rp	32.525.300	
Belanja Barang Pakai Habis	Rp	32.535.500	Rp	32.525.300	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp	708.000	Rp	708.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp	1.655.000	Rp	1.655.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp	14.400.000	Rp	14.389.800	



Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp	625.000	Rp	625.000	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	15.147.500	Rp	15.147.500	
Belanja Perjalanan Dinas	Rp	157.758.000	Rp	155.861.000	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp	157.758.000	Rp	155.861.000	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp	157.758.000	Rp	155.861.000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp	61.309.000	Rp	59.468.600	97,00%
BELANJA OPERASI	Rp	61.309.000	Rp	59.468.600	
Belanja Barang dan Jasa	Rp	61.309.000	Rp	59.468.600	
Belanja Barang	Rp	6.060.000	Rp	6.060.000	
Belanja Barang Pakai Habis	Rp	6.060.000	Rp	6.060.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp	2.360.000	Rp	2.360.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp	585.000	Rp	585.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp	300.000	Rp	300.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp	625.000	Rp	625.000	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	2.190.000	Rp	2.190.000	
Belanja Perjalanan Dinas	Rp	55.249.000	Rp	53.408.600	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp	55.249.000	Rp	53.408.600	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp	49.194.000	Rp	47.356.100	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp	6.055.000	Rp	6.052.500	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rp	18.365.000	Rp	18.027.000	98,16%
BELANJA OPERASI	Rp	18.365.000	Rp	18.027.000	
Belanja Barang dan Jasa	Rp	18.365.000	Rp	18.027.000	
Belanja Barang	Rp	7.195.000	Rp	7.195.000	
Belanja Barang Pakai Habis	Rp	7.195.000	Rp	7.195.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp	390.000	Rp	390.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp	530.000	Rp	530.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp	300.000	Rp	300.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp	500.000	Rp	500.000	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	5.475.000	Rp	5.475.000	
Belana Perjalanan Dinas	Rp	11.170.000	Rp	10.832.000	



Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp	11.170.000	Rp	10.832.000	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp	4.250.000	Rp	3.912.000	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp	6.920.000	Rp	6.920.000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Rp	69.752.000	Rp	68.145.100	97,70%
BELANJA OPERASI	Rp	69.752.000	Rp	68.145.100	
Belanja Barang dan Jasa	Rp	69.752.000	Rp	68.145.100	
Belanja Barang	Rp	4.273.000	Rp	4.268.000	
Belanja Barang Pakai Habis	Rp	4.273.000	Rp	4.268.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp	1.143.000	Rp	1.138.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp	640.000	Rp	640.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp	300.000	Rp	300.000	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	2.190.000	Rp	2.190.000	
Belana Perjalanan Dinas	Rp	65.479.000	Rp	63.877.100	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp	65.479.000	Rp	63.877.100	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp	57.694.000	Rp	56.092.100	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp	7.785.000	Rp	7.785.000	
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp	414.926.000	Rp	413.101.750	99,56%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp	78.199.000	Rp	78.126.000	99,91%
BELANJA OPERASI	Rp	78.199.000	Rp	78.126.000	
Belanja Barang dan Jasa	Rp	78.199.000	Rp	78.126.000	
Belanja Barang	Rp	8.669.000	Rp	8.669.000	
Belanja Barang Pakai Habis	Rp	8.669.000	Rp	8.669.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp	879.000	Rp	879.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp	420.000	Rp	420.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp	300.000	Rp	300.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp	500.000	Rp	500.000	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	6.570.000	Rp	6.570.000	
Belana Perjalanan Dinas	Rp	69.530.000	Rp	69.457.000	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp	69.530.000	Rp	69.457.000	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp	66.070.000	Rp	66.002.000	



Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp	3.460.000	Rp	3.455.000	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp	11.804.000	Rp	11.803.500	100%
BELANJA OPERASI	Rp	11.804.000	Rp	11.803.500	
Belanja Barang dan Jasa	Rp	11.804.000	Rp	11.803.500	
Belanja Barang	Rp	4.884.000	Rp	4.884.000	
Belanja Barang Pakai Habis	Rp	4.884.000	Rp	4.884.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp	230.000	Rp	230.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp	475.000	Rp	475.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp	300.000	Rp	300.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp	375.000	Rp	375.000	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	3.504.000	Rp	3.504.000	
Belana Perjalanan Dinas	Rp	6.920.000	Rp	6.919.500	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp	6.920.000	Rp	6.919.500	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp	6.920.000	Rp	6.919.500	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rp	105.346.000	Rp	104.839.350	99,52%
BELANJA OPERASI	Rp	105.346.000	Rp	104.839.350	
Belanja Barang dan Jasa	Rp	105.346.000	Rp	104.839.350	
Belanja Barang	Rp	9.073.000	Rp	9.073.000	
Belanja Barang Pakai Habis	Rp	9.073.000	Rp	9.073.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp	812.000	Rp	812.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp	320.000	Rp	320.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp	621.000	Rp	621.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp	750.000	Rp	750.000	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	6.570.000	Rp	6.570.000	
Belana Perjalanan Dinas	Rp	96.273.000	Rp	95.766.350	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp	96.273.000	Rp	95.766.350	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp	91.948.000	Rp	91.443.850	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp	4.325.000	Rp	4.322.500	



Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp	135.032.000	Rp	134.007.850	99,24%
BELANJA OPERASI	Rp	135.032.000	Rp	134.007.850	
Belanja Barang dan Jasa	Rp	135.032.000	Rp	134.007.850	
Belanja Barang	Rp	7.273.000	Rp	7.273.000	
Belanja Barang Pakai Habis	Rp	7.273.000	Rp	7.273.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp	679.000	Rp	679.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp	475.000	Rp	475.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp	3.851.500	Rp	3.851.500	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp	625.000	Rp	625.000	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	1.642.500	Rp	1.642.500	
Belana Perjalanan Dinas	Rp	127.759.000	Rp	126.734.850	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp	127.759.000	Rp	126.734.850	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp	121.704.000	Rp	120.679.850	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp	6.055.000	Rp	6.055.000	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rp	21.644.000	Rp	21.632.000	99,94%
BELANJA OPERASI	Rp	21.644.000	Rp	21.632.000	
Belanja Barang dan Jasa	Rp	21.644.000	Rp	21.632.000	
Belanja Barang	Rp	7.164.000	Rp	7.164.000	
Belanja Barang Pakai Habis	Rp	7.164.000	Rp	7.164.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp	494.000	Rp	494.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp	420.000	Rp	420.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp	400.000	Rp	400.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp	375.000	Rp	375.000	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	5.475.000	Rp	5.475.000	
Belana Perjalanan Dinas	Rp	14.480.000	Rp	14.468.000	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp	14.480.000	Rp	14.468.000	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp	12.750.000	Rp	12.738.000	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp	1.730.000	Rp	1.730.000	



Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Rp 62.901.000	Rp 62.693.050	99,67%
BELANJA OPERASI	Rp 62.901.000	Rp 62.693.050	
Belanja Barang dan Jasa	Rp 62.901.000	Rp 62.693.050	
Belanja Barang	Rp 10.247.000	Rp 10.227.000	
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 10.247.000	Rp 10.227.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 1.197.000	Rp 1.177.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp 530.000	Rp 530.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp 750.000	Rp 750.000	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 6.570.000	Rp 6.570.000	
Belana Perjalanan Dinas	Rp 52.654.000	Rp 52.466.050	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp 52.654.000	Rp 52.466.050	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 49.194.000	Rp 49.018.550	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 3.460.000	Rp 3.447.500	
TOTAL	Rp 5.987.944.724	Rp 5.885.800.332	98,29%

Outcome dari PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Bappeda) dengan target nilai Akuntabilitas Kinerja di tahun 2023 adalah 82,79 sedangkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2023 memperoleh nilai 83,75 sehingga sudah mencapai target (100%).

Outcome PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH adalah Persentase OPD yang Mencapai Target Kinerja dengan target di tahun 2023 adalah 70%

Outcome PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH adalah :

1. Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang Perencanaan Bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA dengan target 80 %.
2. Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dengan target 80 %

Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mencapai



target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp.5.987.944.724,-** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp.5.885.800.332,-** dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat kondisi anggaran adalah Silpa **Rp. 102.144.392,-**



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja sasaran, program dan kegiatan juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat menetapkan sebanyak 1 (Satu) sasaran dengan 2 (Dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100.00 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 sasaran tersebut, secara umum telah sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

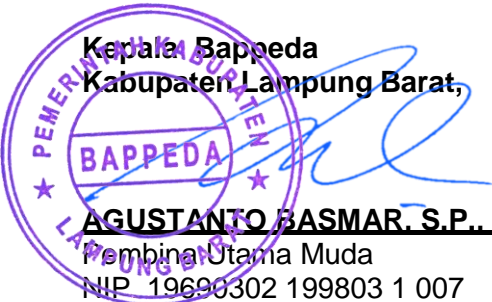
Keberhasilan beberapa indikator Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah berkat kontribusi/dukungan dan kerjasama berbagai pihak di lingkungan internal BAPPEDA dan seluruh *stakeholders* pembangunan di Kabupaten Lampung Barat, yang dapat bersinergi dalam proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan evaluasi.



Dengan pencapaian tersebut, bahwa kegagalan kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sepanjang tahun anggaran 2023 dapat dikatakan tidak terjadi atau dengan kata lain kegagalan kinerja dapat diminimalisir dan pelaksanaan kegiatan telah mengacu kepada dokumen perencanaan dengan indikator yang telah ditetapkan serta target yang realistis. sehingga alokasi anggaran dapat dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin. Sepanjang Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian sangat baik yang terlihat dari pencapaian indikator rata-rata 100%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lampung Barat.

**Kepala Bappeda
Kabupaten Lampung Barat,**



AGUSTANTO BASMAR, S.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690302 199803 1 007